

Analisis Idiosinkratik 10 Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi : Studi Kasus Peran Indonesia Terkait Pengungsi Rohingya

Nila Aditya Devi¹, Ummu Masyithotul Khoiriyah²

^{1,2} Universitas Paramadina, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: nillaadhitya@gmail.com

Abstract: *The policies of a country are determined by a leader and the background of a leader shapes his political personality. The idiosyncratic of a State leader can be influenced by the populism of his country. Indonesia is a democratic country where there is a change of leadership and changes in domestic and foreign policies. Jokowi during his tenure as President of Indonesia has a foreign policy direction that prioritizes diplomacy and negotiations. Jokowi's idiosyncratic in shaping foreign policy related to Rohingya refugees can be seen in the efforts of diplomacy and humanitarian assistance for Rohingya refugees. The embodiment of Indonesia's free-active foreign policy is manifested in policies for domestic pro-people and for international participation in cooperation and the realization of regional and global peace.*

Key Words: *Idiosyncratic, Foreign Policy, Rohingya*

Abstrak: Kebijakan suatu negara ditentukan oleh seorang pemimpin dan latar belakang seorang pemimpin membentuk kepribadian politiknya. Keistimewaan seorang pemimpin negara dapat dipengaruhi oleh populisme negaranya. Indonesia merupakan negara demokrasi yang terjadi pergantian kepemimpinan dan perubahan kebijakan dalam dan luar negeri. Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia memiliki arah politik luar negeri yang mengutamakan diplomasi dan negosiasi. Keistimewaan Jokowi dalam membentuk kebijakan luar negeri terkait pengungsi Rohingya terlihat dalam upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diwujudkan dalam kebijakan dalam negeri yang pro rakyat dan partisipasi internasional dalam kerja sama serta terwujudnya perdamaian regional dan global.
Kata Kunci: Idiosinkratik, Kebijakan Luar Negeri, Rohingya

Pendahuluan

Dimulai dari definisi populisme yang biasanya sering diadu dengan nasionalisme. Populisme bersifat lebih kompleks dari sekedar nasionalisme, namun kedua memiliki sisi yang positif untuk diimplementasikan dalam konteks bernegara termasuk dalam perumusan kebijakan domestik dan luar negeri suatu Negara. Populisme dipahami sebagai model kepemimpinan yang dimiliki dan diimplementasikan oleh pemimpin Negara yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sedangkan nasionalisme dipahami sebagai proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa dan Negara.

“Populism was a type of nationalism which equated „the nation“ and „the people“. Nationalism, from its earlier inception, had the ambition to provide comprehensive macrohistorical explanations of the world“s social, economic and political transformations, populism literature initially adopted a regional and episodic focus, a more reactive than generative stance” (Olivas Osuna, 2021).

Adanya sebuah pemahaman bahwa ideologi adalah sekumpulan ide normatif tentang hakikat manusia dan masyarakat serta organisasi dan tujuan masyarakat. Secara sederhana, ideologi adalah pandangan tentang bagaimana dunia ini dan seharusnya, sehingga dapat saling berasimilasi dan membentuk konsep baru secara kondisional. Populisme sebagai ideologi yang berpusat pada satu tujuan, yang menganggap bahwa masyarakat pada akhirnya akan terbagi menjadi dua kubu yang homogen dan saling bertentangan, yaitu rakyat (the people) dan kaum elit (the elite), dan yang berpendapat bahwa politik seharusnya merupakan ekspresi dari *volonté générale* (general will) kehendar umum/rakyat. Jika dilihat dari sudut pandang ini, populisme harus dipahami sebagai semacam peta mental yang digunakan individu untuk menganalisis dan memahami realitas politik. Populisme bukanlah tradisi ideologis yang koheren, melainkan



sekumpulan ide yang, di dunia nyata, muncul dalam kombinasi dengan ideologi yang sangat berbeda, dan terkadang saling bertentangan (Mudde, 2017).

Mudde dalam bukunya menuliskan definisi *the people*; pertama, bahwa “rakyat” adalah sebuah konstruksi, yang paling tidak merujuk pada interpretasi dan penyederhanaan realitas yang spesifik sehingga memungkinkan banyak fleksibilitas. Kedua, gagasan tentang “masyarakat biasa,” yang secara eksplisit atau implisit merujuk pada konsep kelas yang lebih luas yang menggabungkan status sosial ekonomi dengan tradisi budaya tertentu dan nilai-nilai populer. Ketiga, “rakyat” sebagai bangsa yang mewakili negara-negara secara spesifik dan unik yang biasanya diperkuat oleh peraturan sosial (Mudde, 2017).

Definisi terkait *the elite* dimulai pada penekanan aspek moralitas, bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara rakyat yang murni dan elit yang korup. Elit didefinisikan berdasarkan kekuasaan, mereka yang mencakup sebagai orang pemegang posisi penting dalam politik, ekonomi, media dan seni. Adanya klasifikasi tersebut melahirkan sistem yang kapitalisme, dimana terdapat kaum yang memiliki “special interests” yang cenderung menguntungkan sebagian kelompoknya atau “general interests” yang menguntungkan rakyat. Maka akan kembali pada pemahaman awal pada perbedaan populisme dan nasionalisme pada rakyat dan elit pada sifatnya yang berdasar moral dan etnis (Mudde, 2017).

Konsep ketiga kehendak umum (*volonté générale* atau *general will*). Rousseau membedakan antara kehendak umum (*general will*) dan kehendak semua orang (*will of all*). *General will* mengacu pada kapasitas rakyat untuk bergabung bersama dalam sebuah komunitas dan membuat undang-undang untuk menegakkan kepentingan bersama mereka, sedangkan *will of all* menunjukkan kepentingan tertentu pada saat tertentu (Mudde, 2017).

Populisme ditarik dalam studi kasus kebijakan luar negeri, dapat diimplementasikan dalam idiosinkratik. Idiosinkratik merupakan penggambaran seseorang atau kelompok yang menggabungkan berbagai ideologi, nilai atau konsep yang berbeda untuk menciptakan ideologi atau pandangan yang baru. Idiosinkratik menjadi faktor utama yang dimiliki oleh seorang pemimpin Negara yang akan membentuk kebijakan domestik dan luar negerinya, bisa membawa dampak positif atau bahkan menjadi boomerang dengan melahirkan konflik baru.

Pada tahun 2015, pengungsi Rohingya datang ke Provinsi Aceh dan pemerintah Indonesia menolak kedatangannya sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayahnya. Selanjutnya Indonesia mengambil langkah untuk mengadakan rapat darurat dengan Thailand dan Malaysia sebagai Negara yang berdekatan dengan wilayah Rohingya dan mengalami permasalahan yang serupa. Pertemuan ketiga Negara tersebut menghasilkan “join statement: ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia dimana Indonesia sepakat untuk menerima pengungsi Rohingya secara sementara” (Listiarani, 2020). Namun beberapa tahun kemudian Thailand dan Malaysia berhenti menerima pengungsi Rohingya dan Indonesia menjadi satu-satunya Negara yang menerima para pengungsi tersebut (Listiarani, 2020).

Literatur Review

Pertama, jurnal yang berjudul *Idiosyncrasy in Foreign Policy Decision Making: Situational Analysis of Trump and Biden Approaches towards South Asia* ditulis oleh Dr Muhammad Umer Hayat dan Alina Zaid (2021) menjelaskan tentang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat selama kepemimpinan Trump dan Biden memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan dari idiosinkratik masing-masing (Hayat & Zaid, 2021). Pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan secara signifikan menyoroti keyakinan kepemimpinan beserta

ciri-ciri kepribadiannya. Strategi Biden lebih berakar pada faktor psikologis kognitif daripada emosional yang membuatnya mendapat penghargaan sebagai orang yang benar secara politis, dalam hal ini menempatkan batasan yang sangat besar pada kapasitasnya saat berhubungan dengan khalayak yang besar. Berbeda dengan Trump yang berfokus pada seberapa baik dirinya disukai dan dihormati, daripada prestasi kebijakan dan pencapaian politiknya (Hayat & Zaid, 2021). Dalam jurnal tersebut juga terdapat pembahasan terkait kebijakan luar negeri yang *military-based*, sehingga menjadi perbedaan tinjauan teoritis dan pembahasan dengan jurnal ini.

Kedua, jurnal yang berjudul *Idiosinkratik Donald Trump Terhadap Tindakan Diskriminasi Kelompok Kulit Hitam di Amerika Serikat* ditulis oleh Rachma Putri (2022), menjelaskan terkait faktor idiosinkratik Donald Trump yang menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok imigran kulit hitam yang dilaksanakan kelompok *white supremacy* (Putri & Olifiani, 2022). Dalam jurnal tersebut berfokus pada kebijakan dalam negerinya Donald Trump yang menimbulkan diskriminasi, sehingga menjadi perbedaan sudut pandang bahwa jurnal ini membahas terkait kebijakan luar negerinya.

Ketiga, pada penelitian yang berjudul *Political Leadership and Foreign Policy in Post-Cold War and Turkey* yang ditulis oleh Baris Kesgin sebagai Disertasi Universitas Kansas (2011) menjelaskan terkait idiosinkratik secara detail. Pembahasan bahwa suatu kebijakan atau langkah politiknya tidak dibuat tanpa alasan atau faktor latar belakang dari seorang pemimpin atau pembuat kebijakan (Kesgin, 2011). Penelitian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam ide pembahasan dan penelitian yang dikembangkan oleh penulis untuk menganalisis terkait idiosinkratik Jokowi dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait Rohingya.

Keempat, pada jurnal yang berjudul *An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy* menjelaskan terkait perbedaan kebijakan di masa Jokowi dan SBY sebelumnya. Jokowi menekankan pada diplomasi yang *membumi* atau yang disebut sebagai "*diplomasi pro-rakyat*", yang pemerintahannya fokus pada urusan dalam negeri. Berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono menekankan peran Indonesia semakin kuat pada regional yang berprinsip "*zero enemy and thousands friends*" (Andika, 2016). Faktor utama idiosinkratik atau latar belakang seorang pemimpin Negara menentukan perbedaan fokus pada kebijakan luar negerinya.

Metode Penelitian

Pada metodologi penelitian ini akan menjelaskan secara rinci mengenai topik penelitian, metode penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Penelitian ini menganalisis terkait faktor idiosinkratik kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo terkait pengungsi Rohingya sebagai penelitian terbaru.

Analisis menggunakan metode kualitatif dengan data dimulai dari awal tahun penelitian 2014 hingga proses berlangsung data-data tersebut diperoleh secara terperinci dan sistematis sampai 2024. Analisis akan dilakukan untuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rohingya dengan pembahasan prosesnya yang mendetail. Pengumpulan data melalui penelitian dari jurnal, buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Penelitian dokumen yang digunakan untuk studi ini dapat mencakup buku, jurnal, makalah, arsip, atau catatan instansi/lembaga.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk idiosinkratik Political Personality Profiling Joko Widodo

Berdasarkan informasi dari website kepresidenan RI menjelaskan bahwa; “Ir. H. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961, Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta (Solo) pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Setelahnya, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2014. Saat Pilpres tersebut Joko Widodo terpilih bersama pasangannya, Jusuf Kalla. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2024” (Biro Pers, nd).

Jokowi di usia 53 tahun, menjadi presiden Indonesia ke tujuh dan presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang tidak berasal dari elit politik atau militer. Ia memulai kariernya sebagai pengusaha di industri furnitur dan kemudian terjun ke dunia politik. Konsep "blusukan" mendorongnya untuk mengangkat karirnya, membawanya ke posisi wali kota, gubernur, dan presiden (Pertiwi, 2024).

Latar belakang keluarga Jokowi, merupakan anak tertua dari empat bersaudara, dengan tiga saudara kandung yang lebih muda semuanya perempuan. Sejak kecil, tentu saja ia menjadi panutan bagi ketiga adik perempuannya. Dia tidak hanya berusaha menjadi contoh yang baik, tetapi dia juga berusaha sebaik mungkin untuk melindungi ketiga adik lelakinya dan membuat seluruh keluarganya merasa aman. Jokowi tumbuh dalam keluarga sederhana dan harus pindah beberapa kali karena digusur (Suwiknyo, 2012).

Jokowi memiliki masa kecil yang sulit dan menyakitkan. Saat di Sekolah Dasar, Jokowi bekerja sebagai kuli angkut, ojek payung, dan pedagang. Dia melakukan ini hanya untuk membayar biaya sekolah dan biaya makan sehari-hari. Jokowi juga pernah merasakan sakitnya diusir saat ia masih kecil. Rumahnya telah digusur tiga kali. Selama masa kuliahnya, Jokowi akhirnya mendaftar di Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Di sana ia mempelajari kayu, teknik pengolahan dan kegunaannya (Suwiknyo, 2012).

Latar belakang dan perjalanan hidupnya membentuk karakter kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh politikus pada umumnya. Dengan dikenal sebagai pemimpin yang “blusukan”, Jokowi mengawali karir politiknya sebagai Walikota Solo dan menjadi sosok pemimpin yang kehadirannya dinantikan dan kebajikannya dirindukan rakyat.

“Terdapat dua jenis gaya kepemimpinan yaitu berorientasi tugas (task oriented) dan yang berorientasi konteks (context oriented). Pemimpin yang berorientasi pada tugas/tujuan cenderung untuk mengambil langkah-langkah yang memaksa, sehingga cenderung membawa negaranya ke arah konflik bersenjata karena mereka cenderung kurang bermusyawarah dan berkompromi akibat kecenderungan mereka untuk menantang hambatan-hambatan politis. Sedangkan pemimpin yang berorientasi pada konteks lebih tidak antusias dan mengambil langkah hati-hati atau lambat tapi pasti (incremental), sehingga cenderung kurang membawa Negara mereka ke arah konflik bersenjata karena mereka sangat sensitif terhadap politik domestik” (Affianty, 2015).

Dalam konteks gaya kepemimpinan Jokowi sepanjang karir politiknya sebagai pemimpin daerah dan Negara, menggambarkan bahwa sosok pemimpin yang berorientasi pada konteks (context oriented). Dapat terlihat dari latar belakangnya yang membentuk Jokowi membuat kebijakan yang cenderung selalu berhati-hati dan pelan tapi pasti. Mengingat

masyarakat Indonesia yang memiliki faktor psikologis yang cenderung sensitif terhadap isu-isu politik.

Bentuk Idiosinkratik Leadership Trait Analysis Joko Widodo

Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, beberapa prestasi Jokowi sebagai berikut;

Pertama, ia berhasil merelokasi hampir 1.000 pedagang kaki lima dari Monumen'45 Banjarsari ke Pasar Klithikan, Notoharjo tanpa menggunakan kekerasan, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap sulit atau 44 hampir mustahil dilakukan (Pertiwi, 2024).

Kedua, Jokowi mengimplementasikan program asuransi kesehatan bagi kalangan miskin serta penyediaan layanan kesehatan dengan pembiayaan dari APBD. Ketiga, ia mempermudah proses pembentukan KTP. Atas usaha-usahanya tersebut, Jokowi menerima penghargaan dari Harian Republika sebagai Tokoh Perubahan 2010 dan Majalah Tempo menobatkannya sebagai Tokoh Pilihan pada tahun sebelumnya.

Ketiga, ia berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Solo dari Rp 101 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 181 miliar pada tahun 2011, serta meluncurkan program branding "Solo: The Spirit of Java" untuk memperkuat citra Solo. Di akhir jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi terpilih menjadi Wali Kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project tahun 2012 yang diadakan oleh The City Mayors Foundation yang berlokasi di Inggris atas kinerjanya sebagai Wali Kota Solo.

Setelah resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi membuat beberapa kebijakan yang dinilai sebagai bentuk prestasi dalam sejarah kepemimpinannya. Pertama, penertiban Waduk Pluit, yang sebelumnya dihuni sekitar 1.600 pemukim liar. Keberadaan pemukim liar ini menyebabkan waduk menjadi dangkal dan kurang efektif dalam membendung banjir. Pemindahan dilakukan dengan merelokasi para pemukim liar ke rumah susun, dan proses ini tidak menciptakan gejolak (Pertiwi, 2024).

Kedua, program pemindahan PKL Tanah Abang yang dikenal sebagai penyebab kemacetan dipindahkan ke Blok G Pasar Tanah Abang tanpa kekerasan serta pemberian tempat yang layak dan uang sewa yang cukup terjangkau. Ketiga, penyediaan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu menggunakan Kartu Jakarta Sehat untuk sekitar 4,7 juta orang, serta mewajibkan rumah sakit swasta untuk menyediakan tambahan kelas 3 perawatan sebesar 40%. Keempat, Kartu Jakarta Pintar yang digunakan sebagai alat bantu pelajar untuk mendapatkan dana bantuan di sektor pendidikan (Pertiwi, 2024).

Jokowi berhasil mengubah paradigma pejabat sebelumnya dengan menekankan bahwa pejabat adalah abdi rakyat yang wajib melayani dan bukan dilayani. Prestasi Jokowi selama 1,5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta mendapatkan nominasi penghargaan walikota terbaik di dunia: World Major 2014.

Setelah menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, tahun 2014 secara resmi Jokowi memulai karirnya sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan beberapa pencapaian membanggakan sebagai berikut; Jokowi bersama Kabinet Kerja Jokowi telah mendapatkan beberapa pencapaian seperti, pemerintahannya berhasil dalam penjagaan kestabilan tingkat inflasi di kisaran 3— 4% dalam waktu empat tahun sejak tahun 2016. Pemerintahan Jokowi berhasil mengurangi kemiskinan menjadi single digit yang sekaligus menandai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Dimana pada Maret 2014 kemiskinan masih berkisar di 11,25% dan pada 2018 menunjukkan penurunan di angka 9,82% (Pertiwi, 2024).

Keberhasilan dalam sektor ekonomi juga terlihat dimana Indonesia berturut-turut selalu mencetak surplus selama 2022 dengan jumlah surplus neraca perdagangan Indonesia yang mampu mencapai US\$ 54,46 miliar. Pada program pemerataan pembangunan, kepemimpinan

Jokowi berhasil menurunkan jumlah desa-desa yang tertinggal secara signifikan yakni yang semula berjumlah 17.626 menjadi 6.749 desa (Pertiwi, 2024).

“Menurut Hermann, tipologi gaya kepemimpinan dibagi menjadi empat kategori yaitu pertama, crusader merupakan pemimpin yang menantang hambatan politis dan tertutup terhadap informasi baru; kedua, strategic pemimpin menantang hambatan-hambatan tetapi terbuka bagi informasi; ketiga, pragmatic yang menghormati hambatan politis tetapi tertutup terhadap informasi; keempat, opportunistic yang sadar akan hambatan-hambatan politis dan mencari informasi” (Affianty, 2015).

Berdasarkan definisi tipologi gaya kepemimpinan tersebut, yang dapat digunakan untuk mendefinisikan kepemimpinan Jokowi adalah seorang pemimpin yang strategic. Dimana dengan strategi yang disusun dapat menggambarkan sebagai politisi pemberani namun berhati-hati ketika menjalankan ambisinya.

Selama masa kepemimpinannya, baik sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun Presiden Republik Indonesia, Jokowi tercatat menghasilkan sejumlah kinerja yang cukup signifikan—pencapaian yang jarang diraih oleh pejabat sebelumnya—dengan strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah di masyarakat (Pertiwi, 2024). Namun dibalik keberhasilan kepemimpinan Jokowi, Indonesia juga menghadapi masalah terkait pengungsi Rohingya yang datang dan hidup di Indonesia.

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Pada Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri ditujukan untuk mempertahankan atau mengubah tujuan, kondisi, atau praktik dalam hubungan luar negeri. Beberapa bertujuan untuk mengubah kondisi eksternal demi keuntungan negara, tetapi sebagian besar ditujukan untuk memajukan tujuan domestik seperti keamanan, otonomi, kemakmuran, dan prestise (Affianty, 2015).

“Rosenau menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan keterhubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternalnya, yaitu pertama kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of orientation); seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitments to and plan for action); dan perilaku atau aksi (as a form of behavior)” (Delanova, 2017).

Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (cluster of orientations) merupakan sekumpulan kebijakan yang merespon perubahan lingkungan eksternal, yang menghendaki para pengambil keputusan atau elit (decision maker) untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan orientasi yang dipersyaratkan. Pedoman untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terkait dengan “sikap, persepsi, dan nilai yang berasal dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi suatu negara dalam politik internasional” (Delanova, 2017).

Dalam konteks pengungsi Rohingya, Indonesia memiliki kebijakan yang sangat terbuka menerima kedatangan mereka. Pada saat yang sama, Malaysia, Thailand dan Australia menolak untuk menerima yang salah satu alasannya disampaikan oleh PM Australia. Tony Abbott bahwa “Apa yang kami lakukan adalah menyelamatkan kehidupan di laut. Kami membela kepentingan nasional kami, kami melindungi negara kami dari kejahatan penyelundupan manusia, dan kami akan melakukan apapun untuk tetap mempertahankan keamanan negara kami dan menghentikan perdagangan ini” (Listiarani, 2020).

Pemerintah Indonesia memiliki definisi pengungsi luar negeri yang diatur dalam PerPres no. 125 tahun 2016.

“Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya...” (Listiarani, 2020).

Atas dasar kemanusiaan Indonesia menerima kehadiran pengungsi Rohingya, namun ancaman keamanan muncul sebagai dampak dalam bidang ekonomi, kesehatan, pangan, individu dan komunitas masyarakat. Faktor kultur dan sejarah di Aceh menjadi latar belakang yang sangat dipengaruhi kuat oleh ajaran Islam dimana terdapat istilah “Peumulia Jamee” yang menngharuskan warga Aceh memuliakan setiap tamu yang datang. Disisi lain Aceh pernah mengalami sejarah kelam saat berusaha memperjuangkannya tahun 1967-2005 melalui konflik GAM dan banyak yang mencari perlindungan ke Malaysia dan Australia, sehingga menjadi pemicu secara psikologis dan mendorong pemerintah untuk memilih kebijakan yang terbuka (Listiarani, 2020).

Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana aksi merupakan komitmen dan rencana aksi (set of commitments to and plan for action) yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan untuk menyelaraskan arah politik luar negeri dengan keadaan lingkungan eksternal, guna menjaga koherensi politik luar negeri, kondisi internal negara dan eksternal (Delanova, 2017).

Opini publik juga mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait Rohingya melalui beragam LSM di Indonesia yang bekerjasama dan membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) dan bekerjasama dengan LSM domestik lainnya seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (Listiarani, 2020). Protes damai juga dilakukan masyarakat di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia untuk menuntut Myanmar menyelesaikan masalah tersebut dan menggunakan tagar “saverohingya” untuk mendapatkan dukungan masyarakat di sosial media (Listiarani, 2020).

Opini publik menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan Indonesia terkait Rohingya, mengingat Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Simpati publik terhadap Rohingya, menjadi peluang para pejabat elit politik untuk mengambil peran aktif dan citra yang positif, meskipun dengan alasan ikut mewujudkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

Kebijakan luar negeri, sebagai suatu tindakan atau perbuatan (form of behavior), berupa keputusan dan tindakan nyata para pembuat keputusan, yang erat dengan peristiwa dan keadaan di lingkungan eksternal (Delanova, 2017). Melalui kebijakan luar negeri, negaranegara mampu menghubungkan negaranya dengan peristiwa dan situasi di luar lingkungan eksternalnya, baik dengan tujuan umum dan yang lebih spesifik.

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi melakukan berbagai upaya penting untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar, antara lain adalah meliputi:

1. Pada tahun 2017, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengajukan proposal 4+1 tentang Negara Bagian Rakhine. Keempat elemen tersebut adalah:
Pertama, memulihkan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri sepenuhnya dan jangan melakukan kekerasan. Ketiga, melindungi semua orang di Negara Bagian Rakhine,

tanpa memandang suku atau agama. Keempat, segera membuka akses bantuan kemanusiaan.

2. Mendirikan Kamp-Kamp bagi pengungsi Rohingya, serta memberikan hibah untuk membantu repartiasi pengungsi (Triwahyuni et al., 2021).
3. Memenuhi kebutuhan dasar Pengungsi Rohingya dari bantuan teknis dan psikis, seperti membantu pemenuhan bahan makanan dan penampungan sementara, dan fasilitas bantuan kesehatan (Triwahyuni et al., 2021).

Terdapat survei nasional yang dilaksanakan oleh Indikator Indonesia menyimpulkan berdasarkan data survei masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi selama 10 tahun sebesar 75% (Indikator, 2024). Latar belakang idiosinkratik Jokowi dalam menjadi pemimpin Negara dan membentuk kebijakan luar negeri Indonesia terkait Rohingya mendapat kesan yang positif dan merupakan suatu prestasi bagi jajaran pemerintahannya. Sinergitas Negara dan non-negara yang mampu menjadi aktor dalam proses mengatasi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Jokowi selama menjadi Walikota, Gubernur dan Presiden dibentuk oleh idiosinkratik selama perjalanan hidup dan perjalanan karir politiknya. Gaya kepemimpinan dikenal dengan pendekatan yang merakyat dan kebijakan yang pro-rakyat menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Meluas hingga ke kebijakan luar negerinya yang besar dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik.

Pada saat Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi tujuan masyarakat Rohingya untuk mengungsi dengan tegas mereka menolak karena alasan keamanan domestiknya, namun Indonesia hadir sebagai Negara penyelamat pengungsi Rohingya. Selama priode kepemimpinan Jokowi, terkait pengungsi Rohingya selalu diterima kedatangannya saat memasuki wilayah Indonesia. Solidaritas agama menjadi alasan utama masyarakat Indonesia memberikan tempat untuk pengungsi Rohingya hidup sementara. Didorong dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan untuk melanjutkan hidup bagi pengungsi Rohingya dan ikut serta dalam menyuarakan permasalahan di regional ASEAN serta diplomasi bilateral dengan Myanmar.

Referensi

- Affianty, D. (2015). *Analisa Politik Luar Negeri*. UIN Press, Jakarta.
- Andika, M. T. (2016). An analysis of Indonesia foreign policy under Jokowi's pro-people diplomacy. *Indonesian Perspective*, 1(2), 93–105.
- Delanova, M. O. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Penguatan Diplomasi Ekonomi. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(02), 154–172.
- Hayat, M. U., & Zaid, A. (2021). Idiosyncrasy in foreign policy decision making situational: Analysis of Trump and Biden approaches towards South Asia. *Pakistan Journal of International Affairs*, 4(2).
- Indikator. (2024). *Evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo*. Jakarta: Indikator.
- Kesgin, B. (2011). *Political leadership and foreign policy in post-cold war Israel and Turkey*. University of Kansas.
- Listiarani, T. (2020). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR Vol*, 5(1).
- Mudde, C. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

- Olivas Osuna, J. J. (2021). From chasing populists to deconstructing populism: A new multidimensional approach to understanding and comparing populism. *European Journal of Political Research*, 60(4), 829–853.
- Pertiwi, K. D. (2024). *Analisis model idiosinkratik Presiden Jokowi atas kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah*. Universitas Diponegoro.
- Putri, R., & Olifiani, L. P. (2022). Idiosinkratik Donald Trump Terhadap Terciptanya Tindakan Diskriminasi Kelompok Kulit Hitam Di Amerika SERIKAT. *SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1).
- Suwiknyo, D. (2012). *Jokowi, pemimpin yang rendah hati*. Arus Timur.
- Triwahyuni, S. N., Perdana, F. W., Setiawan, B., Irwan, I., & Wibisono, Y. (2021). Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2118–2125.